

**TINJAUAN YURIDIS PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN  
DI KALANGAN MUSLIM  
(Studi Kasus di Dukuh Tegalsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali)**

**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Disusun Oleh:**

**ESA RIZA ASHARI**  
**C100110167**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVRSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN  
DI KALANGAN MUSLIM  
(Studi Kasus di Dukuh Tegalsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Yang ditulis oleh:

**ESA RIZA ASHARI**  
**C100110167**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

**Pembimbing I**



**(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.)**

**Pembimbing II**



**(Darsono, S.H., M.H.)**

## HALAMAN PENGESAHAN

### **TINJAUAN YURIDIS PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN DI KALANGAN MUSLIM (Studi Kasus di Dukuh Tegalsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali)**

## PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:

**ESA RIZA ASHARI**  
**C100110167**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada tanggal 9 agustus 2016  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

### Dewan Penguji

Ketua : Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Darsono, S.H., M.H

Anggota : Aristtya Windiana, S.H. LMM

()  
()  
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 04 Mei 2016

Penulis



**ESA RIZA ASHARI**  
**C100110167**

**TINJAUAN YURIDIS PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN  
DI KALANGAN MUSLIM  
(Studi Kasus di Dukuh Tegalsari Kec Teras, Kab Boyolali)**

Esa Riza Ashari  
C100110167  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[ezareza880@yahoo.co.id](mailto:ezareza880@yahoo.co.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembagian warisan di Dukuh Tegalsari dan mendeskripsikan pandangan Islam terhadap praktik pembagian harta warisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Dukuh Tegalsari. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pembagian harta warisan di Dukuh Tegalsari menggunakan sistem hukum waris adat, dengan sistem bagi rata dimana pembagian harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan 1 : 1 atau sama rata, walaupun hampir semua penduduk di Dukuh Tegalsari beragama Islam, hal ini dilakukan untuk menjamin dan menjaga kerukunan dan keutuhan keluarga agar tidak ada perselisihan antar keluarga. Islam memandang praktek pembagian harta warisan tersebut sebagai *al-u'rf* yang shahih yang kerap terjadi pada masyarakat tertentu dan pembagian tersebut dapat dianggap sah bagi masyarakat yang membudayakannya, karena unsur-unsur keadilan dan kerelaan menurut suatu masyarakat merupakan hasil dari kesepakatan antara ahli waris dan kondisi lingkungan sekitar.

**Kata kunci:** *pembagian warisan, hukum waris adat, al-u'rf yang shahih*

**ABSTRACT**

This study aimed to describe the division of inheritance in the village Tegalsari and describe Islam views deviation inheritance practices implemented by the Hamlet Tegalsari. The research method using descriptive empirical jurisdiction. Sources of primary data, interviews and secondary data sources of primary law, secondary and tertiary. Data were collected by interview and literature study then analyzed the data qualitatively. The results showed that practices division of inheritance in the village Tegalsari use the legal system of inheritance customs, with the system for the flat where the division of inheritance boys and girls 1: 1 or equally, although nearly all the residents in the village of Tegalsari Muslims, it this is done to ensure and maintain harmony and unity of the family so that there are no disputes between families. Islam regards the division of inheritance practices such as *al-u'rf saheeh* which occurred in a particular community and the division can be considered legitimate for people who cultivate, because the elements of fairness and willingness to think of a society is the result of an agreement between the heirs and environmental conditions.

**Keywords:** *inheritance, customary inheritance law, al-u'rf saheeh*

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk hidup, yang mana setiap makhluk hidup ini akan mati pada saat yang ditentukan. Tiada yang tahu kapan akan datang kematian menimpa diri seseorang, karena kematian adalah rahasia Allah. Kematian tidak dapat dikehendaki ataupun dihindari. Sebagai seseorang makhluk yang menghambakan diri, hanya dapat bersiap-siap jika sewaktu-waktu kematian akan datang. Ketika kematian datang kepada seseorang maka dia akan meninggalkan seluruh anggota keluarganya, dan juga meninggalkan seluruh harta benda yang dia milik. Dalam hal ini maka diperlukan suatu aturan yang akan membahas tentang pembagian harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan juga anggota keluarga yang berhak atas harta tersebut.<sup>1</sup>

Terdapat beberapa aturan dalam Islam tentang pembagian harta benda, salah satu hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia adalah hukum kewarisan. Adapun hukum waris menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 171 huruf (a) adalah “*hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.*” Jadi hukum waris Islam adalah seperangkat aturan tentang proses pembagian harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan menentukan ahli waris mana saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut dan juga ilmu ini mempelajari bagian masing-masing dari harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.<sup>2</sup>

Hukum kewarisan menduduki peranan yang penting di dalam hukum Islam, ayat Al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci, setiap orang pasti akan mengalaminya. Oleh sebab itu, kewarisan juga merupakan salah satu pokok yang sering dibicarakan dan sering kali hukum kewarisan ini

---

<sup>1</sup>Aulia Mutiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, 2015, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hal. 1

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 16

dapat menimbulkan sengketa antara ahli waris. Problema atau masalah yang sering kali selalu menjadi persoalan dalam pembagian kewarisan adalah dalam pembagian warisan tersebut ada salah satu anak yang mendapatkan bagian masing-masing yang sudah ditentukan dalam kewarisan Islam, akan tetapi dalam pemberian bagian tersebut merasa dibeda-bedakan padahal anak tersebut adalah anak kandungnya tetapi yang membedakan adalah gendernya dan karena minimnya pengetahuan dalam hukum kewarisan Islam sering kali hukum kewarisan Islam ini dilupakan.

Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum Islam dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Di samping itu bagian anak laki-laki adalah sebanyak bagian dua dari anak perempuan sebagai mana yang terdapat pada ayat:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya:

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. (Q.S.An-Nisa: 11).*

Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang mengatur dan memuat garis keturunan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu di alihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris. Hukum waris adat bisa juga dikatakan adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi pada keturunannya.<sup>3</sup> Akan tetapi hukum adat kewarisan yang telah ada secara turun temurun mengakibatkan masyarakat Indonesia lebih cenderung menggunakan hukum kewarisan adat sebagai pembagian warisan dibandingkan menggunakan hukum kewarisan Islam.

Harta warisan pada umumnya yang diwariskan masyarakat dukuh Tegalsari adalah seluruh harta benda yang dimiliki baik berupa benda-benda tetap

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal. 7

seperti tanah pekarangan, rumah, dan lainnya. Berdasarkan Pasal hukum kewarisan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 176 Bab III Besarnya Bagian, *“anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separo bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”*.<sup>4</sup> Adapun pembagian warisan di Dukuh Tegalsari pada pembagian harta warisan dibagikan sama rata antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan hukum kewarisan adat setempat. Karena pembagian harta warisan menurut masyarakat setempat baik anak laki-laki maupun perempuan adalah anak, sehingga dalam pembagian harta warisan disamaratakan karena hal tersebut dinilai lebih adil dan tidak akan menimbulkan pertikaian diantara saudara.

Perumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Praktek pembagian warisan di Dukuh Tegalsari, dan (2) Pandangan Islam terhadap praktek pembagian warisan di Dukuh Tegalsari. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pembagian warisan di Dukuh Tegalsari dan mendeskripsikan pandangan Islam terhadap praktik pembagiam harta warisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Dukuh Tegalsari.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data meliputi data primer yaitu wawancara dan data sekunder meliputi sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

---

<sup>4</sup> Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Karisma Putra Utama Offset, Hal. 37



## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Praktek Pembagian Warisan di Dukuh Tegalsari**

Pelaksanaan pewarisan di Dukuh Tegalsari dalam pembagian harta warisan menggunakan sistem hukum waris adat yang dimana hukum waris tersebut menganut sistem *parental* atau *bilateral*, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.<sup>5</sup>

Masyarakat Dukuh Tegalsari untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pembagian warisanya untuk itu mereka melakukan Pembagian harta warisan dalam suasana tanpa persengketaan antara ahli waris dapat dilakukan dengan cara: (a) Musyawarah antara sesama ahli waris/keluarga, (b) Musyawarah antara sesama ahli waris dengan disaksikan oleh sesepuh.

Penulis melakukan penelitian pada 2 keluarga di Dukuh Tegalsari yaitu keluarga Bp. Amad Bibit dan keluarga Bp. Atemo. Keluarga Bp. Amad Bibit melaksanakan pembagian harta warisan dengan cara musyawarah antara sesama ahli waris dengan disaksikan oleh Sesepuh Desa besarnya bagian yang diterima oleh ahli waris yaitu dibagi sama rata setelah dikurangi hutang pewaris, sedangkan di keluarga Bp. Atemo pembagian harta warisannya dilakukan dengan cara musyawarah dengan sesama ahli waris tanpa disaksikan oleh Sesepuh Desa karena menurut keluarga Bp. Atemo masalah pembagian harta warisan keluarganya merupakan masalah pribadi sehingga tidak perlu melibatkan Sesepuh Desa.

Mengenai pembagian harta warisan keluarga Bp. Atemo membagi harta warisan dengan bagian yang lebih besar jatuh pada ahli waris paling akhir karena orang tua ikut tinggal dengan anak tersebut, dan jika orang tua meninggal seluruh

---

<sup>5</sup>Eman Suparman, 2011, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, Hal. 42

biaya pemakaman, biaya yang menyangkut biaya selamatan pewaris, biaya tahlilan dibebankan kepada anak paling bungsu.

Pelaksanaan pembagian warisan pada Dukuh Tegalsari antara lain: (1) Pembagian warisan dilakukan dengan cara musyawarah, musyawarah dengan seluruh ahli waris ataupun musyawarah dengan disaksikan sesepuh desa, itu semua tergantung pada kebijakan keluarga masing-masing, (2) Mengenai waktu pelaksanaan pembagian harta warisan, pembagiannya berdasarkan keinginan pewaris kapan membagikan hartanya kepada ahli warisnya, (3) Bagian yang diterima oleh ahli waris ditentukan berdasarkan musyawarah, dan dapat dibagikan sama rata, (4) Peran kerelaan dan keikhlasan masing-masing ahli waris sangat besar, sehingga ahli waris rela menerima berapa pun bagian yang diberikan kepadanya sesuai hasil kesepakatan dalam musyawarah. Pembagian seperti itu dikarenakan mereka lebih mengutamakan perdamaian, kerukunan dan terlebih lagi demi keutuhan keluarga. Melihat prinsip kerukunan dan kekeluargaan, prinsip musyawarah dan mufakat, dan asas kerukunan dan keluarga, asas musyawarah dan mufakat masyarakat Dukuh Tegalsari dalam besarnya bagian mewaris antara laki-laki dan perempuan adalah sama atau disamaratakan.

#### **Pandangan Islam terhadap Praktek Pembagian Warisan di Dukuh Tegalsari**

Berdasarkan surat An-Nisa ayat 11 dan Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang bagianya sudah ditentukan dalam ayat Al-Qur'an dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) tersebut, untuk itu dapat disimpulkan dalam faktanya di Dukuh Tegalsari tersebut dalam prakteknya sangat jelas bahwa Dukuh Tegalsari menggunakan hukum adat yang dimana praktek didalam Dukuh Tegalsari menggunakan atau menganut prinsip-prinsip hukum adat dan asas-asas hukum adat.

Pelaksanaan yang dilakukan di Dukuh Tegalsari tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 atau Pasal 177-181 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Menurut hukum Islam seharusnya pembagian warisan dilakukan setelah meninggal dunia mengingat salah satu syarat mewarisi adalah meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal dunia).<sup>6</sup> Dan jika warisan tersebut dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia bukan disebut warisan tetapi hibah, yang mana hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibahan masih hidup.<sup>7</sup>

Melihat paparan di atas Dukuh Tegalsari yang keseluruhannya mayoritas agama muslim dalam pelaksanaan pembagian warisan seharusnya memakai hukum kewarisan Islam sebagai orang muslim wajib untuk menjalankan syariat-syariat Islam seperti apa yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Surat An-Nisa ayat 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٣

Artinya:

*(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.*

<sup>6</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2013, *Hukum Waris dalam Islam*, Depok Jawa Barat: Pt Palapa Alta Utama, Hal 38.

<sup>7</sup>Eman Suparman, 2007, *Hukum Kewarisan Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama, Hal 81.

Surat An-Nisa ayat 14:

وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٤

Artinya:

*Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedangkan ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*

Berdasarkan ayat-ayat di atas seharusnya sebagai orang muslim dalam pembagian harta warisan harus dengan syariat Islam karena sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi dalam persoalan kewarisan di Dukuh Tegalsari bagian para ahli waris sama. Salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam dan kewarisan adat adalah dapat ditemui pada keluarga Bp. Atemo dan keluarga Bp. Amad Bibit yang mana pembagian harta warisan di keluarga Bp. Atemo membagi harta warisan dengan bagian yang lebih besar kepada ahli waris yang paling akhir karena orang tua ikut tinggal dengan anak yang paling akhir, dan pembagian harta warisanya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia atau yang disebut dengan hibah, hal ini sesuai dengan yang dikatakan Soepomo, bahwa barang-barang asal suami dan barang-barang asal istri serta barang gono-gini itu tidak ada artinya bila suami istri itu punya anak.<sup>8</sup> Sedangkan di keluarga Bp. Amad Bibit dilakukan dengan cara musyawarah, yaitu masing-masing pihak sepakat untuk membagi warisan berdasarkan keikhlasan masing-masing pihak. Hasil dari musyawarah tersebut menyamakan bagian para ahli waris. Pembagian harta warisan yang demikian dalam hukum Islam bisa dimasukkan dalam konsep *as-Sulhu* atau *takharuj*. *As-sulhu* adalah keikhlasan masing-masing pihak menerima kesepakatan yang disepakati dalam pembagian harta warisan.<sup>9</sup>

Pelaksanaan pewarisan Masyarakat di Dukuh Tegalsari dilihat dari paparan di atas sudah turun temurun sejak dulu, sehingga menjadi kebiasaan, kebaisaan atau 'urf yang sah harus dipelihara keberadaanya dan terhadap

---

<sup>8</sup>Soepomo, 1993, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Paramadina Paramitha, Hal 97.

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 51.

kebiasaan yang tidak sesuai menurut ajaran Islam, maka hal tersebut dianggap salah. Karena tidak sesuai dengan dalil-dalil atau nash yang telah secara jelas ditentukan dalam hukum Islam. Namun dengan pendekatan sosiologis terhadap kebiasaan-kebiasaan itu bisa dikatakan baik, karena dengan praktik-praktik itu mereka pun menemukan kemaslahatan berkeluarga dan bermasyarakat yang menjadi tujuan-tujuan syari'ah.

Mengingat dalam Islam adanya kewarisan sebagai akibat adanya kematian, ini berkaitan dengan asas *ijbari*, asas *ijbari* yaitu asas yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam yang mengandung arti bahwa peralihan harta seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur keharusan (*ijbari = compulsory*) dalam hukum kewarisan Islam terutama terlihat dari segi: ahli waris harus (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu calon pewaris yaitu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan perolehan yang sudah dipastikan. Asas *ijbari* hukum kewarisan Islam dapat pula dilihat dari beberapa segi lain yaitu (a) dari segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia, (b) dari jumlah harta yang sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris, dan (c) dari mereka yang akan menerima peralihan harta peninggalan, yang sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris.<sup>10</sup>

Namun juga harus dicatat bahwa kewarisan sebagian tidak dianut oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara mutlak. Karena pada prinsipnya Islam membenarkan, bahkan juga menganjurkan untuk mengatur anak-anak, keluarga,

---

<sup>10</sup> Mohammad Daud Ali, 2000, *Hukum Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada., Hal.128.

dan kerabat-kerabatnya dengan membagi-bagi harta bendanya kepada mereka dengan sistem hibah atau wasiat. Seorang muslim juga boleh membuat wasiat untuk sebagai ahli warisnya. Disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya:

*“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antar kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”*

Berdasarkan kutipan ayat di atas bahwa orang tua (suami/istri) boleh mengatur harta bendanya dengan sistem wasiat atau hibah. Dan demikian bukanlah penyimpangan, sebab tindakan-tindakan itu sesuai dengan hak asasinya dan sesuai pula dengan ajaran Islam. Bahkan dalam Pasal 211 KHI diterangkan bahwa: “hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”, jadi peralihan harta warisan dapat berlangsung semenjak pewaris masih hidup.

Pertimbangan harta warisan masyarakat Dukuh Tegalsari yang di dasarkan pada kesepakatan bersama atau mufakat adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena mereka mengutamakan rasa saling menerima atau rela. Baik karena pesan orang tua sebagai pewaris maupun norma-norma di masyarakat Dukuh Tegalsari yang telah dianutnya dan dijadikan pedoman untuk hidup mereka.

Pelaksanaan pembagian harta warisan, masyarakat Dukuh Tegalsari cenderung membagikannya ketika pewaris masih hidup (dengan sistem hibah), namun juga ada yang membagikan ketika pewaris atau kedua pewaris meninggal dunia, yang membedakan kewarisan masyarakat Dukuh Tegalsari dengan Islam yaitu waktu peralihan harta, yang di dalam masyarakat Dukuh Tegalsari pembagian harta dilakukan ketika orang tua atau pewaris masih hidup maupun

ketika sudah meninggal, sedangkan Islam peralihan harta dari orang tua atau pewaris ke anak atau ahli waris dilakukan ketika pewaris sudah meninggal dunia.

Mengenai masalah hibah Allah SWT mensyariatkan hibah karena didalamnya terkandung upaya menjinakkan hati dan memperkuat tali kasih sayang di antara manusia.<sup>11</sup> Sedangkan pembagian harta warisan di Dukuh Tegalsari antara anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris yang utama. Sebab anak adalah yang mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta warisan orang tua tersebut. Bagi Dukuh Tegalsari tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan atau siapa saja yang lahir lebih dahulu mempunyai hak yang sama.

Bagian-bagian ahli waris antara anak laki-laki dan perempuan adalah satu banding satu (1:1), mereka yang menyamaratakan bagian antara laki-laki dan perempuan karena yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan adalah jenis kelaminnya. Dan mengenai siapa-siapa yang mendapat warisan tidak diatur secara jelas, yang diutamakan adalah anak-anak mereka baik laki-laki maupun perempuan.

Menurut Bp. Kamali Kementrian Agama Wonogiri mengatakan bahwa sebagai umat muslim menggunakan kewarisan adat itu diperbolehkan. Untuk dapat dikatakan diperbolehkan asal dalam pembagian warisanya harus adanya kesepakatan antara ahli waris, apa bila dalam pembagian warisan menurut adat tidak ada kesepakatan antara ahli waris di anggap tidak sah dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, kesepakatan dalam kewarisan adat terdapat dasar hukumnya yaitu Al'aadah muhkamah yang artinya adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Dalam hukum Islam juga diajarkan unsur perdamaian yang berdasarkan Wa sulhu khair yang artinya berdamaian itu baik, dengan adanya unsur perdamaian dalam pembagian harta warisan agar tidak menimbulkan

---

<sup>11</sup> Al-Sayyid Sabiq, 1983, *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr, Hal. 389

perselisihan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya. Untuk itu tidak dihalalkan bagi seseorang melebihi pemberian antara anak-anaknya, karena hal ini mengandung usaha menabur benih permusuhan serta dapat memutuskan hubungan silaturahmi tali persaudaraan yang justru diperintahkan oleh Allah karena melebihkan diantara anak-anak dalam pemberian merupakan tindakan batil dan menyimpang”.<sup>12</sup>

Menurut Bp. Drs. H. Syarafuddin HZ, M.Ag, Dosen FAI (Fakultas Agama Islam) Universitas Muhammadiyah Surakarta: bahwa hukum Islam itu tujuannya adalah keadilan, menempatkan wanita agar mempunyai hak, bila dilihat kebelakang ketika pada masa nabi mengapa wanita separo bagiannya karena memang wanita pada waktu itu tidak punya hak sama sekali maka dengan adanya separo itu sudah baik. Tetapi pada jaman sekarang yang paling utama yaitu keadilan maka perempuan sama laki-laki bagiannya sama dan tidak menjadi masalah. Apalagi sekarang ini muncul banyak wanita menjadi kepala rumah tangga jadi ada kontrak sosialnya. Sehingga pembagiannya hukum waris secara adat diperbolehkan asal ada keadilan dan saling merelakan antara ahli waris. Dilihat dari sekarang ini masyarakat Indonesia menyelesaikan waris kebanyakan dengan hukum waris adat tidak dengan hukum waris Islam, Karena adat itu justru adat muhkamah yaitu adat yang bisa rela sama rela. Bahwa ayat Al-Quran itu tujuannya adalah keadilan apabila hukum adat yang diterapkan pada masyarakat ada unsur-unsur keadilan di sini kenapa tidak”.<sup>13</sup>

Dilihat dari pendapat Bp. Kamali Kementrian Agama Wonogiri, Drs. H. Syarafuddin HZ, M.Ag Dosen FAI Universitas Muhammadiyah Surakarta dan para ulama-ulama pertimbangan harta waris masyarakat Dukuh Tegalsari yang

---

<sup>12</sup>Kamali, Kementrian Agama Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, Boyolali, 9 April 2016, Pukul 11:00 WIB.

<sup>13</sup>Syarafuddin, Dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 18 April 2016, Pukul 08:00 WIB.



didasarkan pada proses perdamaian, keiklasan dan musyawarah adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena mereka mengutamakan rasa saling menerima.

Sementara itu, dalam kewarisan Islam mengenal adanya asas *ijbari*, artinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya menurut Allah tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas *ijbari* ini terlihat dari segi ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang ditentukan.<sup>14</sup>

Proses pewarisan yang dilakukan masyarakat Dukuh Tegalsari banyak hal yang tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Dalam pandangan penulis jika pelaksanaan itu tidak melanggar dari kaidah hukum Islam dan menjadikan maslahat bagi masyarakat maka tentunya proses kewarisan dalam adat suatu adat itu diperbolehkan, karena pada dasarnya hukum kewarisan itu diperuntukan untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan umat. Tetapi lain halnya dengan pembagian warisan menurut hukum Islam yang sudah ditentukan bagiannya dan pada akhirnya menimbulkan perselisihan yang dikarenakan dibedakan bagiannya antara laki-laki dan perempuan hal itu justru tidak mengindahkan peraturan Islam itu sendiri.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

*Pertama*, praktek pembagian harta warisan yang dilakukan di Dukuh Tegalsari yaitu dengan menggunakan sistem hukum waris adat, yaitu dengan sistem bagi rata dimana pembagian harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan 1 : 1 atau sama rata, walaupun hampir semua penduduk di Dukuh Tegalsari beragama Islam. Pembagian seperti ini dilakukan untuk menjamin dan

---

<sup>14</sup>A. Racmad Budiono, 1999, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya, Hal.2.

menjaga kerukunan dan keutuhan keluarga agar tidak ada perselisihan antar keluarga.

*Kedua*, pada masa sekarang praktek pembagian harta warisan di masyarakat Dukuh Tegalsari dapat dipandang sebagai hasil dari kontrak sosial, untuk itu Islam memandang praktek pembagian harta warisan dengan menggunakan hukum waris adat sebagai *al-U'rf* yang shahih dan menurut Bapak Kamali, Pegawai di Kementrian Agama Wonogiri mengatakan *Al'aadah muhkamah* yang artinya adat kebiasaan dapat dijadikan hukum, dalam hukum Islam juga diajarkan unsur berdamai itu baik. Hal yang sama juga di sampaikan Bapak Drs. H. Syarafudin HZ, M.Ag dosen FAI mengatakan hukum Islam itu tujuannya keadilan bahwa ayat Al-Qur'an itu juga tujuannya adalah keadilan apabila hukum adat yang diterapkan pada masyarakat ada unsur-unsur keadilan kenapa tidak, karena adat itu justru adat *muhkamah* yaitu adat yang bisa rela sama rela yang kerap terjadi pada satu masyarakat tertentu. Dari segi sosial, praktek pembagian harta warisan tersebut dapat dianggap sah bagi masyarakat yang membudayakannya, karena unsur-unsur keadilan dan kerelaan menurut suatu masyarakat merupakan hasil dari kesepakatan antara ahli waris dan kondisi lingkungan sekitar. Keberadaan lingkungan yang berbeda akan menimbulkan variasi pada nilai-nilai kepantasan yang dianut. Oleh karena itu, tradisi pada suatu masyarakat bisa berbeda dengan tradisi pada masyarakat yang lain.

### **Saran**

*Pertama*, kepada peneliti selanjutnya, karena penelitian mengenai tradisi pada suatu masyarakat tertentu merupakan penelitian lapangan yang menuntut seorang peneliti untuk bersifat objektif, karena itu bagi peneliti yang tertarik dengan penelitian semacam ini hendaknya menyiapkan terlebih dahulu perangkat metodologi yang tepat, karena pemilihan metodologi dan pendekatan yang digunakan sangat mempengaruhi sebuah hasil dari penelitian.

*Kedua*, dalam penelitian semacam ini hendaknya peneliti lain tidak berhenti pada penelitian normatif, karena tujuan ini bukanlah mengadili atau menilai sebuah pemaknaan dalam kehidupan, akan tetapi untuk memahami, memaparkan dan menjelaskan gejala-gejala dan fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Ali, Mohammad Daud. 2000. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 2013. *Hukum Waris dalam Islam*. Depok Jawa Barat: PT Palapa Alta Utama.
- Budiono, A. Racmad. 1999. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mutiah, Aulia dan Hardani, Novy Sri Pratiwi. 2015 *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nasution, Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Karisma Putra Utama Offset.
- Sabiq, Al-Sayyid. 1983. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Soepomo. 1993. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Paramadina Paramitha.
- Suparman, Eman. 2011. *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Suparman, Eman. 2007. *Hukum Kewarisan Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama.